

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Pasal 1, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah sebuah badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara melalui investasi langsung dengan sumber dana yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sementara itu, Perusahaan Persero atau yang dikenal dengan Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas, dengan modal yang terbagi dalam bentuk saham, di mana setidaknya 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, dan memiliki tujuan utama untuk memperoleh keuntungan (Republik Indonesia, 2003).

BUMN memainkan peran strategis sebagai agen pembangunan (*agent of development*) sekaligus pencipta nilai (*value creator*) dalam perekonomian nasional. Sebagai agen pembangunan, BUMN tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga mengemban mandat sosial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan pemerataan pembangunan. Misalnya, BUMN di sektor perbankan seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Mandiri memiliki kontribusi besar dalam mendukung inklusi keuangan nasional melalui penyediaan akses layanan perbankan kepada masyarakat lapisan bawah serta penyaluran pembiayaan produktif kepada pelaku UMKM, yang merupakan tulang punggung ekonomi rakyat. Di sisi lain, BUMN sektor konstruksi dan infrastruktur seperti Wijaya Karya (WIKA), PT PP (Persero), dan Hutama Karya berperan penting dalam pembangunan proyek strategis nasional seperti jalan tol Trans Sumatera, pelabuhan terpadu, dan jembatan penghubung wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), yang menjadi prasyarat bagi peningkatan konektivitas dan daya saing ekonomi nasional (Kementrian BUMN, 2023).

Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah lembaga yang menyediakan informasi mengenai perusahaan-perusahaan yang tercatat di Indonesia. Pada tahun 1912, selama penjajahan Belanda di Indonesia, Bursa Efek Indonesia didirikan di Batavia, yang sekarang dikenal sebagai Jakarta. Pemerintah Hindia Belanda mendirikan

Bursa Efek Indonesia untuk memenuhi kebutuhan VOC (*Vereenidge Oost-Indische Compagnie*). Bursa Efek Indonesia bercita-cita untuk menjadi bursa yang kompetitif dengan kredibilitas global dan berkomitmen untuk menciptakan pasar yang aman, adil, dan efisien melalui inovasi yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan (idx.co.id, 2023).

Laman Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan bursa efek sebagai entitas yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau fasilitas untuk memfasilitasi jual beli efek oleh pihak-pihak yang berniat memperdagangkannya. Bursa Efek Indonesia didirikan untuk mengatur dan menyediakan sistem atau fasilitas bagi perdagangan efek. Penyediaan metode dan teknologi yang memadai memungkinkan peserta bursa efek untuk memfasilitasi perdagangan efek secara berkala, adil, dan efisien. Selain itu, sistem dan fungsi terkait tersedia untuk meningkatkan kapasitas bursa efek dalam mengawasi anggotanya secara lebih efisien. Operasional Bursa Efek Indonesia diawasi oleh PT Bursa Efek Indonesia (Ojk.go.id, 2023).

Pada tanggal 25 Januari 2021, Bursa Efek Indonesia (BEI) menerapkan klasifikasi baru untuk sektor dan industri perusahaan tercatat, yang disebut sebagai “Klasifikasi Industri Bursa Efek Indonesia” atau IDX-IC (*Industrial Classification*). Klasifikasi ini terdiri dari 12 sektor utama pada BEI-IC.

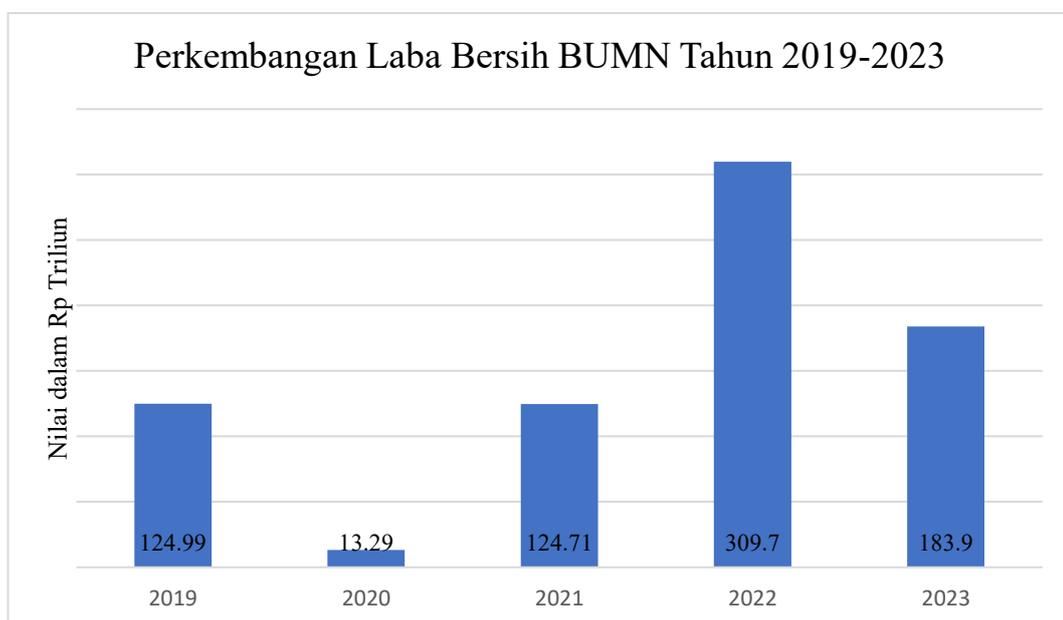
Sektor energi (IDXENERGY) mencakup perusahaan yang bergerak dalam penyediaan dan pengelolaan sumber daya energi, baik konvensional maupun terbarukan, termasuk pertambangan minyak, gas, dan batu bara. Sektor barang baku (IDXBASIC) terdiri dari perusahaan yang memproduksi bahan industri dasar seperti bahan kimia, material konstruksi, dan pertambangan non-energi. Sektor perindustrian (IDXINDUST) meliputi perusahaan penyedia produk dan layanan industri, termasuk peralatan kedirgantaraan, produk kelistrikan, dan jasa profesional. Sektor barang konsumen primer (IDXNONCYC) mencakup perusahaan yang memproduksi produk esensial dengan permintaan stabil, sedangkan sektor barang konsumen non-primer yang berfokus pada barang dan jasa diskresioner seperti kendaraan, pakaian, dan hiburan. Sektor kesehatan (IDXHEALTH) terdiri dari perusahaan farmasi, layanan kesehatan, serta produsen

peralatan medis. Sektor keuangan (IDXFINANCE) mencakup bank, asuransi, layanan investasi, dan perusahaan modal ventura. Sektor properti dan real estat (IDXPROPERTY) terdiri dari pengembang properti dan bisnis pendukungnya. Sektor teknologi (IDXTECHNO) meliputi perusahaan penyedia perangkat lunak, layanan TI, dan produsen perangkat keras. Sektor infrastruktur (IDXINFRA) mencakup perusahaan di bidang transportasi, telekomunikasi, dan utilitas. Sektor transportasi dan logistik (IDXTRANS) berfokus pada layanan pengangkutan dan logistik. Terakhir, sektor produk investasi mencakup berbagai produk investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (idx.co.id, 2023).

Antara tahun 2019 dan 2022, sebanyak 29 perusahaan BUMN tercatat di Bursa Efek Indonesia, yang tersebar di enam sektor utama, yakni keuangan, material dasar, infrastruktur, energi, transportasi & logistik, serta kesehatan. Peran BUMN sangat penting dalam perekonomian Indonesia, karena selain mendukung pertumbuhan ekonomi, mereka juga memberikan kontribusi besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat skala dan pengaruh yang dimilikinya, BUMN sering menjadi fokus dalam berbagai penelitian yang membahas efisiensi operasional, pengelolaan keuangan, serta dampaknya terhadap iklim bisnis secara umum. Oleh karena itu, penelitian yang lebih mendalam diperlukan untuk memahami bagaimana faktor-faktor seperti kinerja keuangan, arus kas bebas, dan kepemilikan institusional dapat memengaruhi praktik manajemen laba di perusahaan-perusahaan ini. Dalam hal ini, manajemen laba menjadi isu yang sangat penting, mengingat tekanan yang dihadapi oleh BUMN untuk mencapai hasil yang maksimal, sekaligus tetap mematuhi regulasi dan menjaga transparansi dalam laporan keuangan mereka.

Secara finansial, performa BUMN menunjukkan dinamika yang menarik dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan data Kementerian BUMN, laba bersih konsolidasi BUMN pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp 124,99 triliun. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat tajam menjadi hanya Rp 13,29 triliun akibat dampak signifikan dari pandemi COVID-19 terhadap aktivitas ekonomi nasional. Kondisi ini mulai membaik pada tahun 2021, di mana laba bersih kembali meningkat tajam menjadi Rp 124,71 triliun. Tren positif ini terus berlanjut

pada tahun 2022, dengan laba bersih melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi Rp 309,70 triliun. Pada semester I tahun 2023, laba bersih yang berhasil dibukukan oleh BUMN telah mencapai Rp 183,90 triliun, menunjukkan kinerja yang solid meskipun baru setengah tahun berjalan. Peningkatan ini menjadi cerminan dari keberhasilan program transformasi dan efisiensi yang dijalankan oleh Kementerian BUMN dalam memperbaiki kinerja keuangan perusahaan-perusahaan pelat merah (Kementerian BUMN, 2023).



**Gambar 1.1 Perkembangan Laba Bersih BUMN Tahun 2019-2023**

*Sumber:* (Kementerian BUMN, 2023), Data Diolah Penulis 2025

Grafik di atas menggambarkan dengan jelas fluktuasi laba bersih BUMN dalam lima tahun terakhir. Penurunan drastis pada tahun 2020 mencerminkan tekanan berat akibat pandemi, namun pemulihan cepat terjadi pada tahun 2021, yang kemudian disusul dengan lonjakan signifikan pada 2022. Bahkan di semester pertama 2023 saja, laba bersih telah melampaui capaian tahunan beberapa tahun sebelumnya. Tren ini menegaskan bahwa transformasi struktural dan efisiensi operasional yang dilakukan oleh Kementerian BUMN memberikan hasil yang nyata dalam memperbaiki kinerja keuangan perusahaan negara.

Pemilihan objek penelitian ini didasari oleh pentingnya peran BUMN dalam mendukung perekonomian Indonesia. Penelitian tentang perusahaan BUMN diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai peluang investasi bagi para investor atau analis pasar. Memahami kinerja keuangan dan prospek perusahaan BUMN dapat menjadi dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan investasi. Objek penelitian ini adalah BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). BUMN merupakan badan usaha yang sebagian besar modalnya, yaitu minimal 51%, dimiliki oleh negara. Tujuan dan misi pendirian BUMN adalah untuk memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Peran BUMN sangat besar, tidak hanya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga dalam membantu meningkatkan pendapatan negara.

## **1.2 Latar Belakang Penelitian**

Praktik manipulasi laporan keuangan (*earnings management*) telah menjadi isu global dalam dunia akuntansi dan tata kelola perusahaan. *Earnings management* merujuk pada upaya manajemen untuk mempengaruhi pelaporan keuangan dalam batas-batas standar akuntansi guna mencapai tujuan tertentu, seringkali dengan mengorbankan transparansi dan akurasi informasi keuangan. Hal ini berpotensi merusak integritas laporan keuangan dan kepercayaan publik terhadap perusahaan.

Di Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi nasional. BUMN yang memiliki total aset lebih dari Rp10.000 triliun pada tahun 2023 (Kementrian BUMN, 2023), berfungsi sebagai tulang punggung ekonomi negara. Namun, meskipun peranannya sangat besar, terdapat sejumlah kasus yang menunjukkan manipulasi laporan keuangan dalam tubuh BUMN. Sejak tahun 2019 hingga 2023, beberapa perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia terlibat dalam kasus manipulasi laporan keuangan yang signifikan. Kasus-kasus ini menyoroti pentingnya penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan etika profesi dalam praktik akuntansi dan audit di sektor publik.

Pada tahun 2019, PT Garuda Indonesia Tbk terlibat dalam skandal manipulasi laporan keuangan yang terungkap ke publik. Isu ini bermula dari

laporan keuangan 2018 yang mencatatkan laba bersih sebesar USD 809.850 (sekitar Rp 11 miliar), padahal pada tahun sebelumnya perusahaan mengalami kerugian sebesar USD 216,5 juta. Perbedaan yang sangat besar ini menimbulkan kecurigaan terhadap keakuratan laporan keuangan Garuda. Setelah dilakukan penyelidikan, terungkap bahwa Garuda Indonesia mengakui pendapatan dari perjanjian kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi yang belum sepenuhnya terealisasi. Perjanjian ini, yang ditandatangani pada 31 Oktober 2018 dan diamandemen pada 26 Desember 2018 dengan durasi 15 tahun, mencatatkan pendapatan sebesar USD 239 juta dalam laporan keuangan 2018, meskipun dana tersebut belum diterima pada akhir tahun tersebut. Hal ini bertentangan dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, yang mengharuskan pengakuan pendapatan hanya ketika pendapatan tersebut telah diterima atau direalisasikan (Diklatkerja, 2025).

Kasus serupa terjadi pada tahun 2023, ketika PT Waskita Karya Tbk menghadapi dugaan manipulasi laporan keuangan yang terungkap pada tahun tersebut. Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatatkan bahwa perusahaan melaporkan kerugian dan arus kas negatif pada tahun 2022 dan kuartal pertama 2023. Kementerian BUMN kemudian meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Pihak manajemen Waskita Karya menyatakan bahwa laporan keuangan telah diaudit oleh auditor independen dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, BPKP menemukan adanya manipulasi laporan keuangan sejak tahun 2016, termasuk penggunaan dokumen palsu untuk pembayaran utang dan proyek fiktif untuk memenuhi tujuan tertentu. Akibatnya, kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 2,5 triliun (Suara.com, 2019).

*Earnings management* ini dapat dijelaskan melalui teori keagenan (*agency theory*) yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976). Teori ini menjelaskan hubungan antara prinsipal, yang dalam konteks ini adalah pemegang saham atau pemilik perusahaan, dan agen, yang dalam hal ini adalah manajemen perusahaan. Dalam teori keagenan, terdapat potensi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen, karena manajemen (agen) mungkin memiliki insentif untuk melakukan

*earnings management* demi mencapai tujuan pribadi atau mempertahankan posisi mereka, meskipun hal tersebut dapat merugikan pemegang saham (prinsipal). Dalam kasus BUMN, keberadaan pemerintah sebagai pemegang saham utama dapat mempengaruhi pengambilan keputusan manajerial, yang terkadang lebih fokus pada stabilitas politik dan ekonomi jangka pendek ketimbang akuntabilitas jangka panjang, yang justru membuka peluang untuk praktik *earnings management*.

Melalui teori keagenan, kita dapat memahami bagaimana manajer (agen) dapat mengatur laporan keuangan untuk mencapai tujuan pribadi atau tujuan organisasi yang tidak selalu sesuai dengan kepentingan pemegang saham atau publik (prinsipal). Oleh karena itu, praktik *earnings management* di BUMN menyoroti pentingnya pengawasan internal dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik untuk mencegah manipulasi laporan keuangan yang dapat merugikan pemangku kepentingan dan masyarakat luas. Pada penelitian ini, peneliti berfokus pada beberapa faktor yang dapat memengaruhi *earnings management*, yaitu koneksi politik, *whistleblowing system*, dan *board gender diversity*.

Faktor pertama, koneksi politik dalam BUMN dapat mempengaruhi akuntabilitas laporan keuangan secara signifikan. Kekuatan koneksi politik seringkali membuat keputusan manajerial lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik ketimbang kepentingan bisnis perusahaan. Dalam hal ini, manajer yang memiliki hubungan dengan pihak berkuasa politik cenderung lebih berfokus untuk mempertahankan hubungan tersebut, meskipun hal ini dapat merugikan transparansi dan integritas laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Lewellyn & Bao (2017) mengungkapkan bahwa koneksi politik memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba (*earnings management*), di mana manajer yang terhubung dengan pihak berkuasa politik lebih cenderung untuk memanipulasi laporan keuangan demi menjaga stabilitas posisi politik mereka. Dalam konteks Indonesia, di mana banyak perusahaan negara memiliki hubungan erat dengan pemerintah, fenomena ini sangat relevan dalam menjelaskan fluktuasi kualitas laporan keuangan yang kadang tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya.

Faktor kedua, *whistleblowing system* yang efektif merupakan komponen penting dalam mendeteksi dan mencegah pengelolaan laba. *Whistleblowing system* yang baik memungkinkan karyawan atau pihak internal perusahaan untuk melaporkan pelanggaran tanpa takut akan pembalasan. Penelitian oleh Lin et al. (2022) menunjukkan bahwa *whistleblowing system* yang tidak efektif berhubungan positif terhadap peningkatan *earnings management* (pengelolaan laba). Artinya, jika *whistleblowing system* dalam suatu perusahaan lemah atau tidak berfungsi dengan baik, hal tersebut dapat menyebabkan pengelolaan laba yang lebih tinggi, karena budaya organisasi yang tidak mendukung pelaporan pelanggaran internal akan menghambat deteksi dini terhadap manipulasi laporan keuangan. Dengan kata lain, ketidakmampuan *whistleblowing system* untuk mengidentifikasi dan melaporkan tindakan manipulatif memungkinkan praktik *earnings management* untuk berkembang tanpa pengawasan yang memadai.

Faktor ketiga, *board gender diversity* dalam dewan direksi telah lama dianggap sebagai faktor penting dalam meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik. Penelitian oleh (Gavious et al., 2012) menunjukkan bahwa keberagaman gender berhubungan positif dengan transparansi laporan keuangan, di mana perusahaan dengan lebih banyak anggota perempuan di dewan direksi cenderung memiliki praktik keuangan yang lebih etis dan terbuka. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Carter et al. (2003) yang menunjukkan bahwa keberagaman gender dapat memperkaya proses pengambilan keputusan dengan beragam perspektif,

Faktor-faktor tersebut telah menjadi perhatian dalam berbagai penelitian terdahulu, terutama dalam konteks penerapan prinsip tata kelola perusahaan dan transparansi pelaporan keuangan. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji praktik *earnings management* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia masih tergolong terbatas. Padahal, BUMN memiliki karakteristik unik seperti kepemilikan mayoritas oleh negara, potensi intervensi politik, serta tanggung jawab sosial yang besar. Selain itu, hasil penelitian sebelumnya terkait pengaruh koneksi politik, *whistleblowing system*, dan *board gender diversity* terhadap *earnings management* menunjukkan temuan yang beragam dan belum konsisten. Ketidakkonsistenan temuan-temuan tersebut menunjukkan adanya

*inconsistency gap* dalam literatur, yang perlu ditelusuri lebih lanjut melalui pendekatan empiris, khususnya dalam konteks perusahaan milik negara di Indonesia.

Merujuk pada latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya, terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi praktik *earnings management* di BUMN, seperti koneksi politik, *whistleblowing system*, dan *board gender diversity*. Kasus-kasus seperti skandal yang melibatkan PT Garuda Indonesia pada tahun 2019 dan PT Waskita Karya pada tahun 2023 menunjukkan bahwa meskipun regulasi *Good Corporate Governance* (GCG) telah diterapkan, masih terdapat celah dalam sistem pengawasan yang memungkinkan praktik manipulasi laporan keuangan terjadi. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap praktik *earnings management* di BUMN. Penelitian ini diberi judul "Pengaruh Koneksi Politik, *Whistleblowing System*, dan *Board Gender Diversity* terhadap *Earnings Management* (Studi pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023)".

### **1.3 Perumusan Masalah**

*Earnings management* merupakan salah satu tantangan utama dalam tata kelola perusahaan, terutama di sektor publik. Praktik ini berpotensi merusak integritas laporan keuangan, menurunkan transparansi, dan mengurangi kepercayaan publik terhadap perusahaan. Meskipun berbagai regulasi seperti *Good Corporate Governance* (GCG) telah diterapkan untuk meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi praktik manipulasi laporan keuangan, masih banyak perusahaan, khususnya BUMN, yang terlibat dalam praktik *earnings management*, seperti yang terlihat pada kasus PT Garuda Indonesia dan PT Waskita Karya. Fenomena ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya efektif dalam mencegah praktik tersebut, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memengaruhi terjadinya *earnings management* di BUMN.

Beberapa faktor yang diduga memengaruhi *earnings management* antara lain koneksi politik, *whistleblowing system*, dan *board gender diversity*. Koneksi politik yang kuat dapat memberikan ruang bagi manajemen untuk melakukan

*earnings management* guna mempertahankan hubungan dengan pihak berkuasa, yang pada gilirannya memengaruhi kualitas laporan keuangan. *Whistleblowing system* yang efektif dapat berperan penting dalam mendeteksi dan mencegah praktik manipulasi laporan keuangan, namun efektivitasnya masih tergantung pada budaya organisasi dan perlindungan terhadap pelapor. Selain itu, *board gender diversity* juga dipercaya dapat meningkatkan transparansi dan pengawasan terhadap praktik-praktik keuangan, serta mengurangi terjadinya *earnings management*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti mengidentifikasi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa hasil deskriptif koneksi politik, *whistleblowing system*, dan *board gender diversity dan earnings management* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019–2023?
2. Apakah koneksi politik, *whistleblowing system*, dan *board gender diversity* berpengaruh secara simultan terhadap *earnings management* di perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019–2023?
3. Apakah koneksi politik berpengaruh terhadap *earnings management* di perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019–2023?
4. Apakah *whistleblowing system* berpengaruh terhadap *earnings management* di perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019–2023?
5. Apakah *board gender diversity* berpengaruh terhadap *earnings management* di perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019–2023?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hasil deskriptif koneksi politik, *whistleblowing system*, dan *board gender diversity dan earnings management* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019–2023

2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan koneksi politik, *whistleblowing system*, dan *board gender* terhadap *earnings management* di perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019–2023
3. Untuk mengetahui pengaruh koneksi politik terhadap *earnings management* di perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019–2023
4. Untuk mengetahui pengaruh *whistleblowing system* terhadap *earnings management* di perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019–2023
5. Untuk mengetahui pengaruh *board gender* terhadap *earnings management* di perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019–2023

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari aspek teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan setelah melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya referensi yang ada terkait praktik *earnings management* di sektor publik, khususnya di BUMN. Meskipun banyak penelitian telah mengkaji berbagai faktor yang mempengaruhi *earnings management*, sebagian besar fokus pada perusahaan swasta atau menggunakan data lintas negara. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi penting dengan lebih menekankan pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), yang memiliki karakteristik khas terkait dengan kepentingan publik dan pengawasan negara.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengembangkan dan memperluas konsep teori keagenan (*agency theory*) dalam konteks BUMN, dengan memasukkan faktor eksternal seperti koneksi politik, *whistleblowing system*, dan

keberagaman *board gender diversity*. Dalam perspektif teori keagenan, penelitian ini tidak hanya memfokuskan pada hubungan antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajemen), tetapi juga menggambarkan bagaimana faktor eksternal seperti politik dan budaya organisasi dapat mempengaruhi transparansi serta akuntabilitas laporan keuangan. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih menyeluruh tentang pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap pengambilan keputusan keuangan di perusahaan milik negara.

### **1.5.2 Aspek Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat diimplementasikan dalam berbagai konteks untuk memperbaiki kualitas tata kelola perusahaan, khususnya di sektor publik. Berikut adalah beberapa manfaat praktis yang dapat diperoleh.

#### **1. Bagi Regulator dan Pembuat Kebijakan**

Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berguna bagi regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian BUMN, dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif terkait dengan pengawasan keuangan dan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di perusahaan BUMN. Hasil penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi celah-celah dalam sistem pengawasan yang masih memungkinkan terjadinya *earnings management*, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat regulasi yang ada.

#### **2. Bagi Praktisi dan Manajemen BUMN**

Temuan penelitian ini dapat digunakan oleh manajemen BUMN untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan serta meningkatkan tata kelola perusahaan. Dengan mengetahui bahwa sistem pelaporan pelanggaran yang efektif dapat membantu mendeteksi manipulasi laporan keuangan, manajemen dapat lebih mendorong budaya transparansi dan pelaporan pelanggaran tanpa takut akan pembalasan. Hal ini tidak hanya akan memperbaiki pengambilan keputusan keuangan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap perusahaan.

### **3. Bagi Stakeholder dan Masyarakat Umum**

Penelitian ini bermanfaat bagi stakeholder perusahaan, seperti investor, pemegang saham, dan masyarakat umum, dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi dan integritas laporan keuangan di perusahaan BUMN. Dengan memperbaiki tata kelola dan pengawasan internal, perusahaan BUMN dapat lebih mampu memberikan informasi keuangan yang akurat dan dapat dipercaya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik terhadap sektor publik.

#### **1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Sistematika Penulisan terdiri dari beberapa bab dan dimaksudkan untuk memberikan arahan kepada pembaca serta memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah penelitian yang telah dilakukan. Bab-bab ini meliputi:

##### **a. BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan gambaran umum penelitian mengenai pengaruh koneksi politik, *whistleblowing system*, dan *board gender diversity* terhadap *earnings management* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019–2023. Termasuk dalam bab ini adalah latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan tugas akhir.

##### **b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menyajikan landasan teori yang mendasari penelitian mengenai koneksi politik, *whistleblowing system*, *board gender diversity*, dan *earnings management*. Selain itu, juga dibahas penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, serta hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini.

##### **c. BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, mencakup jenis dan pendekatan penelitian, operasionalisasi variabel, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis.

#### **d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas hasil analisis data dan pengujian hipotesis mengenai pengaruh koneksi politik, *whistleblowing system*, dan *board gender diversity* terhadap *earnings management*. Penjelasan dalam bab ini mencakup pengaruh masing-masing variabel yang diuji baik secara simultan maupun parsial.

#### **e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai pengaruh koneksi politik, *whistleblowing system*, dan *board gender diversity* terhadap *earnings management* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.